

PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH DINAS SOSIAL SUMATERA UTARA

Fatimah Az-Zahra*¹
Bayu Ardian Syahputra²
Kezia Thasa Emteta Karina Bangun³
Vivin Silvia Boang Manalu⁴
Jamaludin⁵

^{1,2,3,4,5} Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail: fatimahazzahraa2002@gmail.com¹, bayuardiansyahputra7@gmail.com², keziathasa59@gmail.com³, vivinboangmanalu@gmail.com⁴, jamaludin@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan atau upaya pemerintah melalui lembaga yang berperan sebagai penanggulangan masalah sosial gelandangan dan pengemis, maka dari itu peran Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara melaksanakan pembenahan bagi para gelandangan dan pengemis dengan melaksanakan kegiatan Preentif, Preventif, Responsif, Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan yang dapat menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, Untuk mendapatkan keterangan dan dan hasil digunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa upaya rehabilitasi yang diadakan oleh Dinas Sosial Provsu terhadap tunawisma/gelandangan dan golongan papa, mendapatkan tanggapan yang baik dari mereka. Keterangan dari mereka, menjelaskan bahwa mereka dibekali dengan bermacam kemahiran untuk bisa mandiri sehingga tidak turun lagi ke jalan. Mereka juga lebih termotivasi untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Kata kunci: Dinas Sosial, Gepeng, Penerapan, Provsu

Abstract

This research aims to find out how the government's policies or efforts through institutions that play a role in overcoming the social problems of vagrants and beggars, therefore the role of the North Sumatra Provincial Social Service carries out improvements for vagrants and beggars by carrying out Preentif, Preventive, Responsive, Social Rehabilitation and Activities activities that can solve this problem. This research uses a qualitative descriptive approach, to obtain information and results used data collection techniques in the form of literature study, observation, interviews and documentation. From the results of the research conducted, it can be concluded that the rehabilitation efforts carried out by the Provsu Social Service for the homeless / homeless and the poor, received a good response from them. Information from them, explaining that they are equipped with various skills to be independent so that they do not go back to the streets. They are also more motivated to live a better life. Regional Regulation No. 4/2008 can be implemented in accordance with laws and regulations and is acceptable to the community.

Keywords: Implementation, Provsu, Scatter, Social Service

PENDAHULUAN

Gelandangan dan pengemis atau yang sering disingkat gepeng merupakan orang yang sangat merusak kenyamanan masyarakat. Sering sekali kita temui mereka di lampu merah, pinggir jalan, tempat perbelanjaan dan tempat lainnya. Tidak hanya sedikit masyarakat yang resah terhadap mereka, dan maraknya mereka membuat citra suatu kota menjadi buruk. Ada banyak cara yang mereka lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan, yaitu dengan cara merayu bahkan ada yang sampai memaksa. Hal ini pasti sudah menggambarkan bahwasanya masih banyaknya masalah sosial di negara Indonesia, terkhususnya di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya.

Gepeng merupakan permasalahan yang semakin berkembang dimasa ini, dimana mereka harus dipaksa untuk hidup di bawah garis kemiskinan. Gepeng merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sulit dihindari disekitar kita, dimana mereka hidup berkembang biak di kota-kota besar. Salah satu penyebabnya yaitu faktor ekonomi, yang seperti kita lihat hari ini bahan pangan semakin naik dan hal itulah yang memaksa mereka untuk menjadi gelandangan maupun pengemis. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengurangi Gepeng, dikarenakan sering sekali mereka bersembunyi di waktu penertiban berlangsung yaitu razia dan mereka mulai muncul kembali ketika razia telah selesai. Gepeng sangat sering untuk muncul Ketika mereka mendapatkan target untuk di mintai uang seperti, pasar, tempat ibadah, tempat wisata, dan di hari-hari besar. Maka dari itu bisa kita melihat bahwa populasi mereka tidak akan terus sama terkadang bisa menjadi banyak terkadang bisa tidak terlihat sama sekali. Faktor ekonomi yang tidak merata menjadi pemicu kesenjangan yang besar bagi mereka sehingga perbedaan sosial antara mereka yang kaya dengan yang miskin tinggi terutama dikota-kota besar (Nasution & Thamrin, 2016).

Kehadiran gelandangan dan pengemis semakin hari semakin memunculkan kegelisahan untuk warga, sebab sikap mereka yang berani serta tidak peduli akan kenyamanan orang lain. Bila tidak lekas diantisipasi bisa memunculkan kerugian yang lebih besar baik di tengah warga, area sekitar ataupun citra kota Medan. Permasalahan gelandangan dan pengemis sangat membutuhkan perhatian dari Masyarakat dan juga yang paling utama yaitu perhatian pemerintah untuk mengatasi maraknya gelandangan dan pengemis. (Koko Indra Kesuma, 2014)

Dengan keadaan masalah yang telah dipaparkan, sehingga rumusan masalah yang menjadi pusat penelitian ini adalah bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2008 tentang penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Sumatera Utara.

METODE

Penelitian kualitatif adalah sebuah metode untuk meneliti suatu yang berhubungan dengan aktivitas, keadaan, atau berbagai bahan lainnya. Artinya penelitian kualitatif lebih mengedepankan terhadap deskripsi secara keseluruhan, yang akan dapat menjelaskan secara mendetail tentang kegiatan atau keadaan nyata yang sedang terjadi dari pada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang (Fadli, 2021). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari buku dan jurnal. Kumpulan fakta yang akan dijabarkan dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan dan banyak mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Kemudian penelitian dilakukan turun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang sesuai kejadian-kejadian yang terlihat atau sesuai dengan fakta yang disertai dokumentasi yang mendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya menerapkan keadilan bagi setiap warganya dan membuat kesamaan hukum tanpa harus memandang ras, suku, gender, agama, golongan, dan status sosial (WIDAYATI, 2016). Dari sinilah peran pemerintah sangat berpengaruh dalam menerapkan keadilan dan kesamaan hukum bagi para masyarakatnya salah satunya para gelandangan dan pengemis. Dalam menangani kasus masih banyaknya gelandangan dan pengemis peran Dinas Sosial sangat diperlukan. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Provsu dapat berupa pembinaan yang menitik fokuskan untuk mengurangi jumlah tunawisma yang melakukan keseharian atau kegiatan di jalanan, untuk memberdayakan mereka nantinya akan diberikan berupa pelatihan keterampilan oleh setiap individu seperti stimulan dalam bentuk pemberian pelatihan mengenai keterampilan dalam bekerja untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki (Di et al., 2019). Adapun peran atau Upaya Dinas Sosial dalam menangani kasus yang

masih belum tertuntaskan sebagai berikut:

Upaya penanganan gelandangan dan pengemis

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber, mengatakan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara mengadakan program berupa kegiatan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Oleh sebab itu setiap saat mereka melakukan razia dan melakukan kerja sama dengan lintas sektoral dan satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan Satpol PP Kota Medan, Kepolisian Kota Medan.

Pelaksanaan penertiban atau disebut penangkapann yang menysasar para gelandangan dan pengemis seringkali diorganisir, dan hasil penangkapan yang dilakukan oleh Satpol PP dialihkan ke lembaga-lembaga sosial yang menangani masalah gelandangan dan pengemis atau untuk diberikan pelatihan dan sosial. Salah satunya yaitu layanan rehabilitasi agar mereka dapat merubah hidup sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, setelah berakhirnya rujukan dan kembali ke masyarakat. Banyak program dan upaya yang telah dilakukan untuk memerangi gelandangan dan pengemis secara terpadu, berkesinambungan atau acak, namun setiap upaya tanpa memahami permasalahannya akan menimbulkan pilihan yang salah secara fundamental, hal ini terlihat dari latar belakang berkembangnya permasalahan gelandangan dan mengemis antara lain:

1. Menanggulangi Kemiskinan
2. Pendidikan Dengan Masyarakat
3. Bujukan Moral.

Kegiatan Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang penanganan gelandangan dan pengemis bahwa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan di bidang :

1. Preentif

Kegiatan Preentif dilakukan melalui beberapa cara seperti memberikan bimbingan sosial yang laksanakan sesuai aturan ke wilayah kabupaten kota selama 4 bulan sekali yang dibantu oleh aparat pemerintahan dari kabupaten/kota, orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, dan ulama agama. Lembaran yang berisi penjelasan mengenai pembenahan gelandangan dan pengemis dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial di panti sosial yang telah disediakan, lembaran ini akan diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota, untuk disebar dan dipahami oleh masyarakat.

2. Preventif

Penyuluhan sosial dan bimbingan sosial merupakan kegiatan dalam program preventif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di wilayah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Selain penyuluhan dan bimbingan Dinas Sosial Provsu juga memberikan kesempatan bekerja kepada masyarakat rentan seperti perempuan, lansia, wanita hamil, dll. Mereka memerlukan lapangan kerja, akan tetapi dikarenakan mereka yang minim pendidikan membuat mereka jadi sulit mendapatkan pekerjaan, maka dari itu mereka sangat memerlukan lapangan pekerjaan agar tidak menjadi gelandangan dan pengemis yang nantinya berserakan di kota-kota sehingga merusak pemandangan. Kelompok usaha bersama (KUBE) merupakan kegiatan preventif yang dapat dilakukan sebagai salah satu lapangan usaha yang dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk meningkatkan penghasilan, derajat,

kesehatan dan dapat meningkatkan pendidikan untuk anak-anak mereka sebagai bekal masa depan dengan memberikan bantuan belajar secara gratis.

3. Responsif

Usaha rehabilitatif terhadap gelandangan dan pengemis meliputi usaha-usaha penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, bertujuan agar fungsi sosial mereka dapat berperan kembali sebagai warga masyarakat. Dalam hal ini usaha rehabilitatif dilaksanakan melalui panti sosial. Penertiban adalah sebuah kegiatan responsif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara sebagai proses kegiatan gelandangan dan pengemis agar kelak mereka dapat menaati peraturan dan perundang-undangan dengan mempertimbangkan hak-haknya sebagai manusia. Pelaksanaan kegiatan ini juga diperlukan pendamping untuk menangani gelandangan dan pengemis dalam menuntaskan masalah, contohnya orang tua asuh atau para relawan. Sebagai mitra kerja Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara relawan ini berperan juga dalam melaksanakan program kegiatan seperti bidang kesejahteraan sosial.

4. Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi kepada gelandangan dan pengemis seperti tempat penampungan, seleksi, menyantuni, distribusi dan tindak lanjut, yang bertujuan supaya fungsi sosial mereka dapat berguna kembali sebagai warga negara. Dalam hal ini usaha rehabilitasi dilangsungkan lewat panti sosial (Olivia et al., 2022). Pada (2/11/2023) kegiatan rehabilitasi para gelandangan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara bersama dengan dibantu oleh aparat pemerintah lainnya, seperti Dinas Sosial Kota Medan, Satpol PP Provsu, Satpol PP Kota Medan dan RSUD Haji Medan untuk melaksanakan penertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Panti sosial merupakan wadah penampungan bagi para gelandangan dan pengemis setelah dilakukan razia oleh para Satpol PP. Panti sosial ini berada di kota Binjai yaitu UPT Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai, disinilah nantinya gelandangan dan pengemis diuji dengan beberapa langkah sesuai dengan aturan yang berlaku, para gelandangan akan diberikan kegiatan berupa bimbingan spiritual (agama), bimbingan fisik (jasmani), bimbingan sosial, dan bimbingan keterampilan (keahlian).

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial di Dinas Sosial Provsu

Kegiatan rehabilitasi dan bakti sosial yang dilakukan di Dinas Sosial Provsu memakan waktu selama 4 bulan. Namun pelaksanaannya dilihat dari peningkatan tuna wisma dan fakir miskin/pengemis itu sendiri yang mengikuti program tersebut. Apabila memungkinkan tunawisma tersebut menjalani pelaksanaan bakti sosial dan rehabilitasi di dinas sosial daerah lebih dari 4 bulan atau bisa saja kurang dari 4 bulan. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan selama 4 bulan sebagai berikut:

1. Bimbingan Spritual

Mayoritas Gelandangan dan pengemis yang dibina di Dinas Sosial Provsu beragama Islam, maka dari itu bimbingan mental dan spiritual ini tidak lepas dari ajaran agama Islam yang bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan hadist. Pelaksanaan bimbingan ini dilakukan dengan sholat berjamaah di masjid yang sudah disediakan sebelumnya oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara. Setelah selesai melaksanakan shalat berjamaah mereka melaksanakan membaca Al-Qur'an bersama-sama. Setelahnya mereka akan mendengarkan ceramah, pegisi materinya/Ustad sudah disediakan oleh dinas sosial.

2. Bimbingan Sosial

Kegiatan bimbingan sosial untuk membantu mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang nantinya mereka dapat menyesuaikan diri dengan baik. Sehingga dapat

sadar dan turut mewujudkan tanggung jawab sosial dimulai dari lingkungan masyarakat maupun untuk diri sendiri yang nantinya mereka memiliki kemampuan untuk disesuaikan dengan lingkungannya atau peraturan kehidupan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan integrasi dan dedikasi di dalam kehidupan masyarakat secara normatif, sehingga dapat menciptakan kerukunan dan kebersamaan serta gotong-royong. Dalam hal bimbingan sosial, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara menyediakan permainan. Contohnya, bermain bola kasti adalah permainan yang sangat memacu adrenalin yang diperlukan kerja sama tim dan fokus tenaga dan pikiran.

3. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik adalah instruksi untuk mengetahui dan menerapkan kebiasaan hidup sehat secara teratur dan disiplin untuk menjaga keadaan badan supaya tetap sehat. Tujuan bimbingan fisik yaitu untuk melatih, membangun, dan mendorong mereka untuk mempertahankan kesehatan jasmani dan menanamkan kedisiplinan diri dalam lingkungan sosial yang normatif dan diwarnai dengan suasana kemandirian dan kebersamaan.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap Gepeng yang dibina memiliki keinginan agar tetap mempertahankan kondisi kesehatan tubuh yang baik dan percaya diri, serta tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk menciptakan integrasi dengan masyarakat. Bimbingan fisik ini berfokus pada olahraga yang dibimbing oleh Dinas Sosial. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani mereka. Salah satu kegiatan bimbingan fisik ini adalah senam yang didirungi oleh musik. Kegiatan ini dilakukan setiap pagi dari pukul 06.00 hingga 09.00 WIB.

4. Bimbingan Keterampilan

Pelatihan keterampilan yang diajarkan di Dinas Sosial Provsu ini keterampilan pembekalan, meliputi :

a. Pelatihan Menjahit

Pelatihan menjahit ini ditujukan untuk klien yang hanya bisa menjahit. Klien yang mengikuti pelatihan ini adalah ibu mastun. Pelatihan menjahit ini dilakukan seminggu sekali pada hari Selasa dari pukul 12.00 hingga 12.45 dengan bimbingan ibu Khoirunnisa. Metode ini terdiri dari teori dan praktik yang diberikan dari awal, termasuk pembuatan taplak dengan benang, ukuran, dan kain. Kemudian, pembimbing memberikan contoh taplak meja. Karena tidak semua klien dapat membuat, meskipun telah dilatih dan dibimbing, diperlukan kesabaran dalam praktik ini.

b. Keterampilan Kerajinan Tangan

Hasil kerajinan tangan dari sabut kelapa adalah keset pintu. Kerajinan ini merupakan pelatihan keterampilan yang diadakan setiap hari Selasa pukul 12:45-13:30 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Pak Kus dengan menggunakan bahan hati dan bambu dikarenakan selain biayanya murah, bahannya sangat mudah ditemukan.

c. Keterampilan Pertanian

Para tunawisma dan pengemis diberikan pelatihan pertanian, mulai dari bercocok tanam, menanam biji-bijian seperti jagung, sayur mayur seperti bayam, dan lain-lain. Pelaksanaan bimbingan kompetensi dijadwalkan setiap Rabu pukul 09:00 hingga 11:25 WIB. Rehabilitasi tunawisma dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provsu sudah menampilkan perubahan keterampilan dan mental yang berubah menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah melewati masa rehabilitasi yang telah ditentukan, para tunawisma dan pengemis

tersebut sehat jasmani dan kuat secara mental. Ilmu yang diperoleh setelah rehabilitasi dapat diterapkan dalam pengobatan yang dilakukan secara spiritual maupun psikologis. Mampu mengelola hubungan sosial di masyarakat dengan baik. Menurut penilaian pasca rehabilitasi, Anda memiliki keterampilan yang baik (Nelya et al., 2020).

KESIMPULAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, kebijakan ini adalah solusi yang dibuat Pemerintah Daerah untuk mengatasi atau mengurangi masalah sosial gelandangan dan pengemis. Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang penyelesaian masalah gelandangan dan pengemis bahwa di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan di bidang kegiatan preventif, kegiatan preventif, kegiatan responsif dan kegiatan rehabilitasi. Adapun kegiatan rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial Sumatera Utara selama 4 bulan yaitu bimbingan mental spritual, bimbingan sosial, bimbingan fisik dan bimbingan keterampilan. Adapun beberapa kegiatan di dalam bimbingan keterampilan yaitu pelatihan menjahit, keterampilan kerajinan tangan, dan Keterampilan tangan. Rehabilitasi yang telah diadakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara kepada gelandangan dan pengemis, maka dengan itu gelandangan dan pengemis menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam segi keterampilan dan perubahan mental yang jauh lebih baik dari pada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Di, W., Medan, K., Hasibuan, P. Y., & Pane, S. B. (2019). *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Tuna. 8(2)*, 2019.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kegiatan Razia Gabungan Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*. (2023). Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- Koko Indra Kesuma. (2014). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 71–85. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1362>
- Nasution, C., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan. *Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 105–119.
- Nelya, B., Jonni, D., & Sihombing, P. (2020). Peranan Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Tunawisma Dan Pengemis Di Sumatera Utara. *Jurnal Governance Opinion*, 5(1), 21–29.
- Olivia, A., Sinaga, M., & Bara, S. B. (2022). Issn 2720-9652. *Abdi Humaniora*, 2(2). <https://doi.org/10.24036/abdi-humaniora.v2i02.117424>
- WIDAYATI. (2016). *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.